



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Agustus 2008

Halaman: 3

PNS Dilarang Nongkrong

Mamin Cukup di Ruang

JOGJA - Rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan gaji PNS hingga 15 persen dinilai ironis dibandingkan pola kinerja yang selama ini diterapkan. Terbukti masih banyak PNS yang hobi nongkrong di kantin pada saat jam kerja. Sekadar merokok dan baca koran atau sarapan. Seperti yang terlihat di kantin Balai Kota Timoho kemarin.

Wakil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menandakan hal itu suatu bentuk pelanggaran. "Tidak ada jam istirahat bagi PNS," tegasnya kemarin. Haryadi mengatakan sesuai ketentuan Pemkot Jogja, jam kerja PNS hanyalah jam masuk dan pulang. "Kalau ingin pakai jam istirahat, emangnya mau kalau jam pulang juga diundur lebih sore."

Banyaknya PNS yang jajan di kantin juga ditanggapi dingin wawali.

► Baca PNS... Hal 13

Pengaturan Kinerja PNS Terbentur Aturan Pusat

■ PNS

Maryoto
Sambungan dari hal 3

Menurutnya, makan memang bagian dari rutinitas, tapi tetap harus dilakukan tanpa membuang waktu bekerja. Jika perlu, waktu makan dibuat seperti minum. "Tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi jajan. Semua bisa diatur. Sehingga untuk makan dan minum (mamin) tetap tidak boleh meninggalkan ruangan," tandasnya.

Kepala Bawasda Kota Jogja Maryono mengatakan, masalah kedisiplinan bagi PNS menjadi tugas masing-masing kepala SKPD, dinas, badan atau kantor. "Itu harus dilakukan secara berjenjang melalui pengawasan melekat (waskat)," ujarnya.

Dikatakan Maryono, jam kerja PNS sesuai ketentuan dari Senin-Kamis pukul 07.30-14.30, Jumat 07.30-11.30, dan Sabtu 07.30-13.00. "Jam kerja itu kan 37,5 jam tiap minggu. Bagi yang butuh makan bisa telepon ke kantin

supaya diantar," imbaunya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Arif Noor Hartanto mengatakan, pengaturan kinerja PNS terbentur aturan pusat. Antara *reward* dan *punishment*-nya tidak berimbang. Menurutnya, sebelum ada kenaikan gaji, pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu tentang kinerja dan kontribusi yang diberikan setiap PNS. "Pemerintah harus cerdas. Paling tidak tanpa melanggar peraturan pusat, pemerintah daerah mendapat kekeluasaan dan

bisa memberi sanksi tegas bagi PNS yang melakukan pelanggaran," katanya.

Beberapa karyawan toko di Jalan Malioboro mengakui gaji PNS yang tidak mungkin pernah turun justeru semakin menyulitkan masyarakat kecil. "Masak gaji PNS saja yang selalu dinaikkan, sementara buruh kecil tidak pernah diperjuangkan. Padahal, setelah kenaikan gaji PNS itu pasti harga-harga jadi lebih mahal," kata Andi, 33, pekerja sebuah perusahaan tekstil. (yog)

2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005